



**BAGIAN ANGGARAN 005.05
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

SEMESTER I TAHUN 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.05



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85

Telp. 0318665369 Fax. 0318665369

Sidoarjo - Jawa Timur

e-mail : surabaya@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2021 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Penanggungjawab
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
per 30 Juni 2022
Plh.Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang



AINUR ROFIQ,S.E.
PENATA TK I NIP 197903172006041004

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
A. Tanah	7
B. Gedung dan Bangunan	7
C. Peralatan dan Mesin	7
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
E. Aset Tetap Lainnya	8
F. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
G. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16

V. Kendala dan Saran	17
5.1. Kendala	17
5.2. Saran	17
VI. Penutup	18
Lampiran	
I. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
II. Laporan Barang Intrakomptabel	
III. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	
IV. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan	
V. Laporan Aset Tak Berwujud	
VI. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik	
VII. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca	
VIII. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan	
IX. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL	

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat

Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebesarRp. 19.536.085.206 dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	0
Tanah	0
Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jaringan	0
Aset Tetap lainnya	0
Kontruksi Dalam pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0
Total	0

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester II tahun 2021 dengan Semester I Tahun 2022.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
SEMESTER II TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2022
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TAHUN 2021</i>	<i>SEMESTER I TAHUN 2022</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0
Total	0	0

4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun tidak mengalami perubahan
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester II Tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 tidak mengalami perubahan.
- e. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tetap yang tidak digunakan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester II Tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester II Tahun 2021 per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai Semester I Tahun 2021 per 30 Juni 2021 sehingga nilai persediaan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA SEMESTER II TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2022

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER II TAHUN 2021</i>	<i>SEMESTER I TAHUN 2022</i>
Barang Konsumsi	0	0
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester II Tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Militer III-12 Semester I Tahun 2022.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2022

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0
Total	0	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Selama periode Semester I Tahun 2022 tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh subbagian umum dalam penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPKNL. Namun, langkah perbaikan tetap diperlukan khususnya dalam hal penatausahaan BMN sehingga dapat diperoleh tata kelola BMN yang lebih baik.

5.2. SARAN

Agar para staf dibagian penatausahaan BMN dapat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis dalam penatausahaan BMN sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan dalam penatausahaan BMN.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 dapat dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
BAGIAN ANGGARAN 005.05
SEMESTER I TAHUN 2022**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2022.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2022

a. Saldo Awal Tahun Semester I 2022 TA 2022

Nilai BMN per 1 Juli 2022 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Tidak

terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	0	0	0
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat barang persediaan dalam kondisi rusak dan usang.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2021 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). mutasi tambah seluas 10 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	0

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	0

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Alat besar (3.01)

Tidak ada jenis barang berupa Alat Besar pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Angkut di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Angkut dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol kuantitas Alat Angkut dengan nilai sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat

0

0

Kelompok barang Alat Angkut yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0.

3) Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Ukur tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Ukur tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Ukur di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

4) Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*sembilan ratus nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

5) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

6) Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

7) Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

8) Alat Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

9) Alat Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah Rp. 0(*nol rupiah*)dan mutasi kurang sebesar Rp. 0(*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Peralatan Pemancar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Peralatan Pemancar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

10) Komputer Unit (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut seluruhnya merupakan saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.0 (*nol rupiah*) sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

11) Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022a adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut seluruhnya merupakan saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

12) Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut seluruhnya merupakan saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

13) Unit Peralatan Proses Produksi (3.17)

Saldo Unit Peralatan Proses Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut seluruhnya merupakan saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses Produksi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses Produksi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Unit Peralatan Proses Produksi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkutan	0	0	0
3.	3.03 Alat Ukur	0	0	0
4.	3.04 Alat Pengolahan	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor	0	0	0
6.	3.05 Alat Rumah Tangga	0	0	0
7.	3.06 Alat Studio	0	0	0
8.	3.06 Alat Komunikasi	0	0	0
9.	3.06 Peralatan Pemancar	0	0	0
10.	3.10 Komputer Unit	0	0	0
11.	3.10 Peralatan Komputer	0	0	0
12.	3.15. Alat Kerja penerbangan	0	0	0
13.	3.17 Unit Peralatan Proses Produksi	0	0	0
Total		0	0	0

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
14.	4.01 Bangunan Gedung	0	0	0
15.	4.02 Monumen	0	0	0
16.	4.03 Menara	0	0	0
17.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
Total		0	0	0

5). Aset Tetap Lainnya (4.01)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

1). Aset Tetap Lainnya

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
18.	4.01 Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Total	0	0	0

6. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Aset Tetap yang tidak digunakan Lainnya pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

2) Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 Rp. 0 (*nol rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

3) Alat studio (3.06)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

4) Alat Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

5) Komputer Unit (3.10)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

6) Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

c. Barang Milik Negara

1. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 adalah s Rp. 0 (*nol rupiah*), Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan		0		0		0
	Sub Jumlah		0		0		0
	Aset Tetap						
	Tanah		0		0		0
	Peralatan dan Mesin		0		0		0
	Gedung dan Bangunan		0		0		0
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0		0		0
	Aset Tetap Lainnya		0		0		0
	Konstruksi dalam Pengerjaan		0		0		0
	Sub Jumlah		0		0		0
	Aset Lainnya		0		0		0
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0		0		0
	Aset tak Berwujud		0		0		0
	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah		0		0		0
	Total		0		0		0

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 30 Juni 2022 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	0		0)		0	
Gedung dan Bangunan	0				0	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0				0	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0		0		0	
Total	0		0		0	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 30 Juni 2022 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	0	0	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	0	0	0

V. Informasi BMN Lainnya

a. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	RP.	%.
1					
2					
3					
4					
5					

b. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

2. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna	0	0	0	0	0

6	Barang Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

3. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

2. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

d. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. Masih rendahnya pemahaman Satuan Kerja terhadap penatausahaan dan pengelolaan BMN.
2. Terbatasnya jumlah pegawai yang dapat melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

e. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan pegawai yang berkompeten dalam setiap pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN.
2. Berkoordinasi dengan pihak KPKNL setempat dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Penanggungjawab
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
per 30 Juni 2022
Plh. Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang

AINUR ROFIQ,S.E
PENATA TK I NIP 197903172006041004